

Implementasi Program Badan Restorasi Gambut Di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar

Yuni Safitri Haryani ¹, Rizky Setiawan ²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* yunisafitriharyani@student.uir.ac.id

Abstrak

Badan Restorasi Gambut memiliki program 3R yaitu rewetting (pembasahan), revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi program Badan Restorasi Gambut dalam merestorasi hutan dan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang kemudian juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi Badan Restorasi Gambut dalam merestorasi hutan dan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Konsep teori yang digunakan adalah teori evaluasi program model CIPP (Context, Input, Process and Product) oleh Daniel Stufflebeam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi program Badan Restorasi Gambut khususnya pada program pembasahan (wetting) dengan kegiatan pembangunan sekat kanal di Desa Rimbo Panjang belum berjalan secara optimal. Pembangunan sekat kanal belum mampu membasahi gambut secara tuntas sehingga titik api masih ditemukan di Desa Rimbo Panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi program Badan Restorasi Gambut dalam kegiatan pembangunan sekat kanal adalah kurangnya sumber daya yang digunakan, keterlambatan distribusi anggaran, inkonsistensi dalam rencana restorasi gambut, kurangnya regulasi untuk kegiatan restorasi gambut, kurangnya peran lembaga restorasi gambut. Pemerintah Desa dan pola pikir masyarakat banyak yang belum memahami tentang program restorasi gambut.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Restorasi Gambut

Abstract

The Peat Restoration Agency has a 3R program, namely rewetting, revegetation and community economic revitalization. The purpose of this research is to describe the evaluation of the Peat Restoration Agency program in restoring forests and peatlands in Rimbo Panjang Village and then also to find out the factors that influence the evaluation of the Peat Restoration Agency in restoring forests and peatlands in Rimbo Panjang Village, Kubu Babussalam District, Rokan Hilir Regency in 2018. The theoretical concept used is the CIPP (Context, Input, Process and Product) model program evaluation theory by Daniel Stufflebeam. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by interview and documentation. The result of this research is that the evaluation of the Peat Restoration Agency program, especially in the wetting program with canal block construction activities in Rimbo Panjang Village, has not run optimally. The construction of canal blocks has not been able to completely wet the peat so that hotspots are still found in Rimbo Panjang Village. Factors affecting the evaluation of the Peatland Restoration Agency program in canal blocking construction activities are the lack of resources used, delays in budget distribution, inconsistencies in peat restoration plans, lack of regulations for peat restoration activities, lack of role of peat restoration institutions. The village government and the mindset of many people do not understand the peat restoration program.

Keywords : Implementation, Program, Peatland Restoration

PENDAHULUAN

Permasalahan Program Badan Restorasi Gambut termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Provinsi Riau memiliki lahan gambut terluas di Pulau Sumatra, yaitu 5,09 juta hektar atau 56,42 persen dari luas total lahan gambut di Sumatra. Akan tetapi, lahan gambut yang terdapat di Provinsi Riau kini mengalami kritis akibat kebakaran yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau terjadi selain karena faktor alam, kebakaran juga terjadi karena berbagai macam tindakan dari para oknum yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut. Permasalahan tentang kebakaran hutan dan lahan ini telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kejadian ini terjadi setiap tahun secara berulang, khususnya di Provinsi Riau dan Provinsi lainnya.

Ekosistem gambut yang ada di Riau menjadi potensi utama kebakaran menjadi semakin parah. Lahan gambut diubah fungsinya menjadi areal perkebunan, dengan kondisi kering. Sifat lahan gambut jika terbakar sulit untuk dipadamkan, karena kedalaman gambut di bawah tanah yang bisa mencapai sepuluh meter. Struktur ekosistem gambut sebetulnya sudah dipahami oleh pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Berbagai upaya pengendalian telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, seperti pemantauan titik panas, penyusunan dan sosialisasi Peraturan Perundangan, pembentukan lembaga - lembaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan, melakukan koordinasi vertikal-horizontal atau pusat-daerah, kampanye, penyuluhan, apel siaga, patroli pencegahan, inventarisasi penyebab kebakaran dan pembuatan peta rawan kebakaran.

Kebakaran gambut adalah akibat pemanfaatan rawa gambut yang tidak bertanggung jawab. Kanal-kanal yang dibangun oleh perusahaan menyebabkan lahan gambut menjadi rusak dan kering serta menjadi mudah terbakar. Berkaca pada bencana kabut asap tahun sebelumnya, seharusnya pemerintah punya solusi ampuh untuk mengatasi masalah kebakaran lahan. Namun nyatanya keterbatasan air masih menjadi masalah klasik. Terbatasnya sumber air di Desa Rimbo Panjang menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat Desa Rimbo Panjang.

Restorasi gambut itu sendiri adalah upaya pemulihan ekosistem gambut tergradasi agar kondisi hidrologis, struktur dan fungsinya berada pada kondisi pulih. Untuk itu dilakukan pembahasan kembali material gambut yang mengering akibat turunnya muka air gambut.

Badan Restorasi Gambut memiliki program yang akan dilaksanakan pada 7 Provinsi. Provinsi yang akan dilaksanakannya program yaitu : Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau. Badan Restorasi Gambut mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi ketujuh Provinsi tersebut karena kondisi lahan gambut yang telah rusak dan kering secara berlebihan akibat terbakar.

Desa Rimbo Panjang adalah sebuah desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Desa Rimbo Panjang yang membentang jalan raya Pekanbaru Bangkinang lebih kurang 10 km². Kebakaran yang terjadi di desa ini menyebabkan dampak kabut asap sampai ke Pekanbaru. Kabut asap yang sampai ke Pekanbaru mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim.

Program dari Badan Restorasi yang ada di Desa Rimbo Panjang adalah untuk rewetting (pembasahan) yaitu pembuatan sumur bor. Tujuan pembangunan sumur bor dilaksanakan di Desa Rimbo Panjang adalah untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Program Badan Restorasi Gambut yang diharapkan dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan langkah awal pembasahan ternyata belum berjalan maksimal. Adapun fenomena yang

ditemui antara lain :

1. Komunikasi yang terjalin antara Badan Restorasi Gambut, Pemerintah Desa Rimbo Panjang dengan Masyarakat Peduli Api terlihat jarang. Hal ini dikarenakan Badan Restorasi Gambut yang berada di pusat. Selain itu, Badan Restorasi Gambut juga melaksanakan program untuk 7 provinsi. Oleh sebab itu Badan Restorasi Gambut jarang berkunjung untuk melihat program yang telah dilaksanakan di desa Rimbo Panjang. Hal ini menyebabkan Badan Restorasi Gambut tidak mengetahui apa yang menjadi kendala di lapangan.
2. Anggaran dalam pembangunan sumur bor ini dari Badan Restorasi Gambut, dengan Rp. 2.000.000 per sumur bor. Akan tetapi, dalam pembangunan sumur bor ini tidak terdapat anggaran untuk biaya operasional. Akibatnya, sumur bor yang telah dibangun di Desa Rimbo Panjang kondisinya tidak terawat.
3. Kondisi kebakaran hutan dan lahan tidak terkoordinir dengan baik sehingga terjadi kebakaran hebat yang menlenyapkan hutan-hutan di Desa Rimbo Panjang.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

Lokasi penelitian berada di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Desa Rimbo Panjang adalah menjadi salah satu lokasi lahan yang sering terjadi kebakaran yang asapnya dapat mengganggu penerbsngsn di Bandara Sultan Syarif Kasim. Kebakaran yang terjadi secara berulang di Desa Rimbo Panjang menyebabkan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang menjadi kering yang berlebihan.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan terkait penelitian ini. Berikut ini adalah Kepala Badan Restorasi Gambut Provinsi Riau, Kepala Desa Rimbo Panjang dan Masyarakat Desa Rimbo Panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Implementasi Program Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, pihak Badan Restorasi Gambut yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program 3R (*rewetting, revegetation, dan revitalisasi*) yang ada di Desa Rimbo Panjang. Pihak Badan Restorasi Gambut yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program 3R (*rewetting, revegetation, dan revitalisasi*) yang ada di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang. Revgetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat adalah memberdayaka untuk mengelola lahan gambut berbasis lahan dan berbasis air seperti pertanian tanpa bakar, perikanan air tawar, peternakan dan pengembangan komoditi local, adapun beberapa pelaksanaan program tersebut antara lain pembukaan lahan swah bekas lahan terbakar untuk ditanam padi, pemberian bantuan pada pokmas (kelompok masyarakat) berupa hewan ternak sapid an

peralatan tangkap ikan kepada kelompok nelayan.

2. Sumber daya

Dalam program *rewetting* (pembasahan) dalam kegiatan pembangunan sumur bor, perlunya sumber daya manusia yang terlatih dalam pembuatannya. Oleh karena itu, Badan Restorasi memberikan pelatihan mengenai pembuatan sumur bor berbasis masyarakat. Pelatihan ini diberikan kepada masyarakat agar setelah pembangunan sumur bor ini dilaksanakan masyarakat Desa Rimbo Panjang lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan sumur bor dan dapat merawat sumur bor yang telah dibangun tersebut.

Selain sumberdaya manusia yang terlatih, juga diperlukan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program ini. Anggaran dalam pembangunan sumur bor ini dari Badan Restorasi Gambut, dengan Rp. 2.000.000 per sumur bor. Akan tetapi, dalam pembangunan sumur bor ini tidak terdapat anggaran untuk biaya operasional. Akibatnya, sumur bor yang telah dibangun di Desa Rimbo Panjang kondisinya tidak terawat.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Komunikasi antar Pelaksana

Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Komunikasi yang terjalin antara Badan Restorasi Gambut, Pemerintah Desa Rimbo Panjang dengan Masyarakat Peduli Api terlihat jarang. Hal ini dikarenakan Badan Restorasi Gambut yang berada di pusat. Selain itu, Badan Restorasi Gambut juga melaksanakan program untuk 7 provinsi. Oleh sebab itu Badan Restorasi Gambut jarang berkunjung untuk melihat program yang telah dilaksanakan di desa Rimbo Panjang. Hal ini menyebabkan Badan Restorasi Gambut tidak mengetahui apa yang menjadi kendala di lapangan.

Komunikasi Program Penanggulangan Kebakaran Lahan, ada beberapa komunikasi yang digunakan untuk mendukung keberhasilan dalam program ini yaitu; Komunikasi antar program BRG, komunikasi dilakukan dengan masyarakat, komunikasi dengan perusahaan/swasta. Terkait dengan program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut yang ada di Tambang ini untuk komunikasi yang intensif antara masyarakat dengan BRG dalam hasil pengamatan penelitian ini adalah melalui program Desa Peduli Gambut, selain program revitalisasi ekonomi, revegetasi lahan dan

pembangunan infrastruktur lahan gambut. Karena program Desa Peduli Gambut adalah proses kegiatan yang menuntut interaksi secara intensif untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat. Kepentingannya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi mengenai profil dan potensi desa gambut serta memberikan pelatihan, pendidikan dan wawasan pada masyarakat desa gambut terhadap pemahaman, potensi, pengelolaan, dan kerentanan ekosistem gambut sebagai lahan yang menjadi tempat kehidupan masyarakat.

Untuk menjamin keberlanjutan restorasi gambut di tingkat desa, BRG memfasilitasi pemerintah desa untuk mengintegrasikan beberapa kegiatan perlindungan gambut ke dalam dokumen perencanaan desa (RPJM Desa atau RKP Desa). Selain itu desa-desa didorong membentuk peraturan di tingkat desa untuk melindungi ekosistem gambut. Dalam upaya menjaga tanggungjawab lingkungan dan program restorasi gambut secara bersama-sama BRG juga menggandeng perusahaan yang ada di Riau salah satunya adalah PT. Chevron. Posisi perusahaan PT. Chevron Pasific Indonesia disini adalah sebagai mitra dari BRG yang juga akan membantu dalam hal pendanaan.

5. Sikap Para Pelaksana

Pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparat dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, *target group* dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Program restorasi gambut yang dijalankan BRG bukanlah pekerjaan yang mudah dikerjakan, oleh karenanya langkah BRG untuk bermitra dengan sejumlah LSM dalam dan luar negeri, kemudian melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan kebijakan yang tepat. Selain kerjasama dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara dan 7 kepala daerah, BRG juga melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, antara lain Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Jambi (Jambi), Universitas Riau (Pekanbaru), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Tanjungpura (Pontianak), Universitas Palangka Raya (Palangka Raya), Universitas Mulawarman (Samarinda), Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), Institut Pertanian Bogor (Bogor), Universitas Sebelas Maret (Surakarta), Universitas Cenderawasih (Jayapura), Institut Teknologi Bandung, Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto), Universitas Kristen Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di samping itu BRG juga bekerja sama dengan enam lembaga riset/universitas dari luar negeri, yakni Universitas Kyoto dan Universitas Hokkaido dari Jepang, RIHN (lembaga riset pemerintah Jepang), Universitas Queensland (Australia), Universitas Finlandia, dan Universitas Leicester (Inggris).

Revitalisasi ekonomi masyarakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal restorasi gambut. program revitalisasi ekonomi masyarakat yang dilakukan mendorong sistem pertanian terpadu dilahan gambut dimana sistem surjan dan paludikultur menjadi pilihan utamanya.

Program ini melakukan identifikasi jenis-jenis tanaman yang ramah terhadap ekosistem gambut. Demikian pula dikembangkan perikanan air tawar dan peternakan. Pengembangan teknologi pertanian adaptif di lahan gambut menjadi prioritas dalam program ini. Program ini juga mengembangkan strategi penguatan rantai pasok kepada lokal, nasional dan internasional. Revitalisasi ekonomi masyarakat ini memiliki beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut adalah bantuan ekonomi produktif dan desa peduli gambut. Untuk Desa Rimbo Panjang, Badan Restorasi Gambut menerapkan bantuan ekonomi produktif. Bantuan ekonomi produktif adalah bantuan yang bersifat membantu masyarakat dalam mengembangkan produktifitas dengan memanfaatkan lahan gambut tanpa merusak dan membakar melalui pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Melihat kondisi mata pencaharian masyarakat Desa Rimbo Panjang yang mayoritas sebagai petani nenas. Selain itu, nenas menjadi salah satu pilihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Rimbo Panjang karena Desa Rimbo Panjang menghasilkan banyak nenas dan dapat diolah agar nilai jual nenas menjadi meningkat. Akan tetapi, dalam pelaksanaan budi daya nenas gambut yang direncanakan akan dilaksanakan setelah pembangunan sumur bor belum terlaksana hingga tahun 2021.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Program Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan program Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang dilihat dari beberapa faktor yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi belum berjalan dengan optimal. Ketidak optimalan Pelaksanaan program Badan Restorasi Gambut yang ada di Desa Rimbo Panjang disebabkan kurang berjalannya komunikasi antara Badan Restorasi Gambut dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat Peduli Api karena kondisi Badan Restorasi Gambut yang berada di pusat. Ketidakjelasan dana operasional untuk perawatan sumur bor yang telah dibangun di Desa Rimbo Panjang. Selanjutnya mengenai fasilitas dari Badan Restorasi Gambut dalam Pelaksanaan pembangunan sumur bor di Desa Rimbo Panjang yang kurang, fasilitas dalam hal ini adalah dana operasional dan mesin robin yang kurang untuk mengoperasikan sumur bor yang telah dibangun untuk pembasahan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang.
2. Program Revitalisasi Ekonomi Masyarakat dengan bantuan ekonomi produktif di Desa Rimbo Panjang dengan melakukan kegiatan budidaya nenas gambut, program ini belum berjalan hingga tahun 2021. Ketidakefektifan dalam komunikasi mengakibatkan program ini belum diketahui kapan akan dilaksanakan di Desa Rimbo Panjang.

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, penulis ingin memberikan saran terkait dengan masalah yang terjadi, sebagai berikut :

1. Bagi Badan Restorasi Gambut dan Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Riau hendaknya lebih meningkatkan lagi evaluasi terhadap program restorasi gambut khususnya pada program rewetting (pembasahan) dengan kegiatan sekat kanal mulai dari komponen konteks, masukan, proses hingga mencapai komponen hasil sesuai dengan yang diharapkan. Badan Restorasi juga diharapkan dapat meningkatkan anggaran dan ketepatan waktu dalam penyaluran anggaran, menambah regulasi tentang sistematika pelaksanaan kegiatan program restorasi gambut, serta meningkatkan sumber daya manusia dan sosialisasi kepada kelompok masyarakat pelaksana kegiatan agar kegiatan pembangunan sekat kanal dapat berjalan dengan optimal.
2. Pemerintah Desa diharapkan agar dapat mengkoordinasikan kepada

masyarakat yaitu dengan pendekatan yang intensif kepada masyarakat yang belum mengerti tentang program dari Badan Restorasi Gambut khususnya kegiatan pembangunan sekat kanal yang telah dilaksanakan. Pemerintah Desa juga diharapkan memasukkan kegiatan restorasi gambut ke dalam RKPDes sebagai program-program berkelanjutan dalam pemulihan lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Dwijowijoto, R. (2008). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- George, E. I. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: D.C. Robert L. Peabody .
- Hanif, N. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Islamy, M. I. (2000). *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koryati, N. D., & dkk. (2005). *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI .
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada .
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut* . (n.d.).
- Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut* . (n.d.).
- Pressman, J. a. (2012). *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press .
- Ryaas, R. (1997). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya .
- Syafiie, I. K. (2005). *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Bandung: Mandar Maju .
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* . (n.d.).
- Van Meter, D. a. (1975). *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework."* *Administration And Society*.